BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Cimahi

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan bahwa dalam melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan didalamnya terjadi berbagai proses interaksi sosial yang melibatkan banyak komponen. Proses tersebut bejalan dengan lancar apabila ditunjang oleh komunikasi yang baik dan lancar. Keberhasilan pelaksanaan suatu pengolahan data pendidikan salah satunya ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima atau dipahami oleh seluruh pegawai. Dalam implementasi kebijakan komunikasi harus dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya secara konsisten dan jelas.

Transformasi atau penyampaian informasi, proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat sesuai sasaran yaitu mengenai pendidikan dari tingkat TK sampai SMK di Kota Cimahi. Proses komunikasi yang berlangsung antar masyarakat dengan pelaksana kebijakan yang transparan ini dimaksudkan untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara

pelaksana kebijakan dengan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pendidikan.

Kejelasan dan kepastian informasi mengenai mekanisme informasi pendidikan melalui aplikasi Padati Web, merupakan wujud dari pemerintah Kota Cimahi untuk memberikan informasi yang prima sebagai bentuk pencapaian visi dan misi Kota Cimahi. Adanya kejelasan informasi mengenai data pendidikan di Kota Cimahi diharapkan dapat memudahkan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memberikan informasi kepada masyarakat dan Kemendiknas.

Dengan demikian, mengenai proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web berjalan dengan baik karena informasi mengenai data pendidikan yang diberikan dari pimpinan Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada bawahannya dapat diterima atau dipahami dengan jelas.

Untuk lebih jelasnya, mengenai proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan sistem aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

4.1.1 Transmisi atau Penyampaian Informasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Persyaratan pertama bagi implemetasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan itu dapat diikuti. Salah satu cara suatu kebijakan dapat diterjemahkan dengan baik oleh para pelaksana adalah dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

Penyaluran informasi yang dilaksankan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi ditujukan kepada sasaran yang tepat yaitu sekolah yang ada di lingkungan Kota Cimahi serta Kemendiknas yang memperoleh perkembangan informasi data pendidikan Kota Cimahi secara cepat. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mudah dimengerti, namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mengalami beberapa kendala. Kendala terjadi dari berbagai aspek misalnya penyampaian yang seharusnya mudah dimengerti oleh setiap sekolah pada pelaksanaannya sekolah mengalami beberapa kendala misal dalam pengisian kuesioner, prosedur yang telah ditetapkan sudah sesuai dan tinggal pelaksanaannya. Hal ini menghadapkan pada kenyataan bahwa setiap prosedur yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Proses penyampaian informasi mengenai pendidikan di Kota Cimahi melalui Sistem Aplikasi Padati Web yang dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Kota Cimahi kebijakan ini diambil agar informasi mengenai data pendidikan yang meliputi jumlah sekolah yang ada di Kota Cimahi, jumlah siswa-siswi di Kota Cimahi yang meliputi menurut jenis kelamin dan tingkatan, jumlah kepala sekolah dan guru di Kota Cimahi yang meliputi kepala sekolah/*headmaster* menurut jabatan (terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap), menurut jenis kelamin (terdiri dari laki-laki dan perempuan), guru/*teachers* menurut status kepegawaian (terdiri dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri), pegawai yang ada di Kota Cimahi yang meliputi pegawai menurut jenis pekerjaan (terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga teknis), kelas, ruang kelas yang meliputi menurut status kepemilikan (terdiri dari ruang kelas milik), dan menurut kondisi (terdiri dari baik, rusak ringan, dan rusak berat) diketahui oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi pemberintahuan informasi dilakukan menggunakan jaringan komputerisasi yang bebasis *data base* yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Proses pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengenai pendidikan sudah dinilai cukup baik, hal itu dapat dilihat dengan beberapa kendala pengimplementasian dari Sistem Aplikasi Padati Web. Data yang ditampilkan dalam *website* hanya meliputi sebagian gambaran umum dengan tampilan angka dan menjelaskan presentasi dari setiap data informasi yang meliputi jumlah data sekolah, pendaftar, siswa, pegawai kelas, ruang kelas. Hal yang menjadi sebuah

kendala penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur adalah hanya menampilkan data-data angka sedangkan data yang dibutuhkan juga yaitu kejelasan data pendidikan yang akurat dan lebih spesifik lagi. Sehingga untuk sebagian kalangan yang membutuhkan informasi data pendidikan ini dinilai kurang memuaskan untuk data sebuah informasi yang ditampilkan sebuah *website*.

Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi hanya bisa memberikan informasi kepada sekolah yang ada di Kota Cimahi yang membutuhkan mengenai data pendidikan di Kota Cimahi hanya melalui *data base* yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi di dalam pelaksanaan Aplikasi Padati Web dalam rangkuman status negeri dan swasta, nomer telepon, serta email tidak bisa muncul atau terbaca pada hasil *print out*, tidak bisa proses rangkuman data setelah *entry* data sehingga tidak dapat muncul di http://www.padatiweb.kemdiknas.go.id. Sehingga untuk memperoleh data pendidikan Kota Cimahi setiap sekolah yang ingin melihat dan membutuhkan informasi yang lebih spesifik sekolah perlu datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Hal ini menjadi kendala penyampaian informasi terhadap sekolah yang membutuhkan sehingga seakan-akan fungsi aplikasi data informasi kurang dilakukan dan pelaksanaan kurang maksimal.

Validasi data pokok sekolah, verifikasi data banyak terjadi kesalahan pada pengimputan data hal ini karena *entry* data belum masuk ke dalam sistem, belum terkumpulnya data dari sekolah yang harus dikumpulkan di ICT Center (pusat

teknologi yang mengumpulkan data pendidikan melalui sistem) sehingga menghambat kinerja aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

Dengan demikian, mengenai transmisi atau penyampaian data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan cukup baik, namun disamping itu ada beberapa kendala yang terjadi misalnya dengan kurang cepatnya data yang dibutuhkan dalam proses pengumpulannya dan kurang maksimalnya proses ataupun data yang tersampaikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web sehingga dengan adanya ini Sistem Aplikasi Padati Web dapat memperbaharui proses penyampaian data tersebut.

4.1.2 Kejelasan Informasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Jika suatu kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Para pelaksana merasakan kebingunan atau kurang jelas untuk melaksanakan pengolahan data pendidikan. Kejelasan dan kepastian informasi mengenai Sistem Aplikasi Padati Web sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan Sistem Aplikasi Padati Web yang dirintis sejak 2006, dikembangkan untuk membantu mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data khususnya di Kota Cimahi.

Sejak dari dikembangkan dari tahun 2006, Sistem Aplikasi Padati Web telah melakukan proses pendataan data pendidikan di Kota Cimahi. Untuk memperoleh gambaran atas keberhasilan dan keefektifan *performance* (pengoperasian) dalam mendukung pendataan pendidikan, pada tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan penelitian di daerah terpilih salah satunya di Kota Cimahi. Dari hasil penelitian terhadap keefektifan Sistem Aplikasi Padati Web, diketahui bahwa hasil penilaian Sistem Aplikasi Padati Web sebagai perangkat lunak pendataan, menunjukan kondisi yang belum memuaskan. Namun setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari lapangan, Sistem Aplikasi Padati Web sudah menunjukan kinerja lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari spesifikasi untuk Sistem Aplikasi Padati Web sudah memenuhi kebutuhan dan informasi kepada masyarakat menjadi jelas.

Kejelasan informasi dalam Implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi tentang pengolahan data dan informasi pendidikan dinilai sudah baik, karena kejelasan informasi di dalam pengolahan data dan informasi pendidikan dapat di pertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Pengolahan data dan informasi pendidikan berisikan informasi mengenai jumlah sekolah yang ada di Kota Cimahi, jumlah siswa-siswi di Kota Cimahi yang meliputi menurut jenis kelamin dan tingkatan, jumlah kepala sekolah dan guru di Kota Cimahi yang meliputi kepala sekolah/*headmaster* menurut jabatan (terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap), menurut jenis kelamin (terdiri dari laki-laki dan perempuan), guru/*teachers* menurut status kepegawaian (terdiri dari pegawai negeri dan bukan

pegawai negeri), pegawai yang ada di Kota Cimahi yang meliputi pegawai menurut jenis pekerjaan (terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga teknis), kelas, ruang kelas yang meliputi menurut status kepemilikan (terdiri dari ruang kelas milik), dan menurut kondisi (terdiri dari baik, rusak ringan, dan rusak berat). Berdasarkan keterangan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi bahwa kejelasan tentang pengolahan data dan informasi pendidikan telah di informasikan melalui media seperti *website*.

Peran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi ingin menciptakan kejelasan informasi mengenai pendidikan maka dari itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi menggunakan Sistem Aplikasi Padati Web agar adanya kejelasan, namun dalam pelaksanaannya belum terdapat kejelasan yang signifikan terhadap perubahan sekolah, misalnya apabila ada saran ataupun usulan dari sekolah dalam hal apapun terkesan terlambat pada pelaksanaannya, sehingga peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi cukup baik dan perlu pembaharuan proses pengimplementasiannya.

Informasi-informasi untuk mengetahui data pendidikan seperti, jumlah sekolah negeri atau swasta dari mulai TK sampai dengan SMK, jumlah siswa dari mulai TK sampai dengan SMK, jumlah guru yang ada di Kota Cimahi telah tersedia di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi melalui Padati Web. Informasi-informasi yang tersedia misalnya, gambaran umum sekolah di Kota Cimahi, jumlah sekolah di swasta menurut jenjang akreditasi tiap Kecamatan Kota Cimahi, jumlah siswa menurut tingkat tiap Kecamatan di Kota Cimahi, jumlah rencana penerimaan, pendaftaran, dan siswa baru tingkat I tiap kecamatan

di Kota Cimahi, jumlah lulusan menurut program pengajaran tiap kecamatan di Kota Cimahi, jumlah kepala sekolah dan guru menurut jabatan tiap kecamatan di Kota Cimahi, jumlah kepala sekolah dan guru menurut status kepegawaian dan golongan tiap kecamatan di Kota Cimahi.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa penyampaian informasi mengenai pengolahan data dan infomasi pendidikan di Kota Cimahi dilakukan dengan cukup baik. Hasil dari kejelasan informasi tersebut, diharapkan adanya: *pertama*, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi pendidikan yang dibutuhkan seperti jumlah sekolah mulai dari tk sampai dengan SMK negeri maupun swasta yang berada di Kota dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa berbelit-belit. *Kedua*, masyarakat memperoleh informasi menganai pendidikan menjadi lebih cepat. Hasil wawancara dengan Sub Bagian Program dan Pelaporan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi, dalam memberikan kemudahan untuk masyarakat maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, harus melaksanakan asas-asas sebagai berikut: *pertama transparan*, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dipahami dan dimengerti.

Kedua akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *ketiga pertisipatif*, yaitu mendorong peran serta masyarakat khususnya di Kota cimahi dalam pemberian informasi pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, *keempat profesional*, pemrosesan pemberian informasi

pendidikan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik validasi administratif maupun verifikasi lapangan.

Dengan demikian, mengenai kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan dinilai cukup baik karena Informasi-informasi pendidikan yang diberikan kepada Kemendiknas seperti, jumlah sekolah negeri atau swasta dari mulai TK sampai dengan SMK, jumlah siswa dari mulai TK sampai dengan SMK, jumlah guru yang ada di Kota Cimahi telah tersedia di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Cimahi melalui Sistem Aplikasi Padati Web.

4.1.3 Konsistensi Penyampaian Informasi dalam Pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten terhadap tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melanggar dari ketentuan di dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2005 tentang organisasi dan tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 41 yang menjelaskan bahwa Pusat Statistik Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta statistik pendidikan. Sedangkan pasal 42 disebutkan bahwa Pusat Statistik Pendidikan menyelenggarakan fungsi

pengumpulan dan pengelolaan data pendidikan, pelaksanaan penyusunan statistik pendidikan, pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan informasi pendidikan, pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelaksanaan urusan ketatatausahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh keterangan bahwa implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang didasarkan pada pemberian informasi mengenai pendidikan di Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi sudah cukup konsisten memberikan informasi kepada Kemendiknas.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya Sub Bagian Program dan Pelaporan menyebutkan melakukan *input* data sebanyak satu kali dalam satu tahun. Hal ini dinilai sangat kurang untuk sebuah pertemuan yang membicarakan laporan tentang input data karena memungkinkan dalam kurun satu tahun banyak sekali hal-hal ataupun data-data yang perlu di perbaharui dan perlunya memberikan inovasi untuk Sistem Aplikasi Padati Web agar lebih baik pelaksanaannya.

Dengan demikian, mengenai konsistensi penyampaian informasi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan dengan cukup baik karena pimpinan Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Cimahi sudah memberikan instruksi seperti penyebaran kuesioner kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi secara konsisten kepada para bawahannya. Hal ini dapat dilihat dari penginputan data yang dilakukan sudah

berjalan dengan cukup baik karena terkadang penyampaian yang diberikan ataupun intruksi yang diberikan kepada bawahan kurang dimengerti. Sehingga adanya sedikit kesalahan dalam pelaksanaannya, pimpinan perlu menjalankan dan memberikan ketegasan agar lebih mudah dipahami oleh bawahannya.

4.2 Kemampuan Sumber Daya dalam Implementasi Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Cimahi

Perintah-perintah implementasi mungkin dapat diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, namun jika kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya merupakan faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya ini meliputi pegawai dengan jumlah memadai yang disertai dengan kualitas yang baik, finansial dan fasilitas yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sumber daya merupakan salah satu komponen yang patut diperhatikan secara lebih karena tanpa adanya sumber daya maka kebijakan hanya akan menjadi lembaran-lembaran kertas yang berisi konsep-konsep yang tidak akan mempunyai pengaruh apapun bagi organisasi. Kemampuan sumber daya suatu organisasi akan sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan demikian, mengenai sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam proses Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web telah berjalan cukup baik, tetapi peneliti melihat pada unsur kewewenang yang diberikan oleh pimpinan Sub Bagian Program dan Pelaporan kepada staf Sub Bagian Program dan Pelaporan itu sendiri masih mengalami kendala. Diantaranya adalah pembagian tugas yang belum merata, hal ini terjadi karena tidak semua aparatur memahami Sistem Aplikasi Padati Web. Sebagai akibatnya, data-data mereka yang belum menyerahkan arsip menjadi menumpuk sehingga proses pengimputan data jadi terhambat.

Untuk lebih jelasnya, mengenai kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Aparatur merupakan salah satu dari bagian sumber daya yang keberadaannya paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu kebijakan itu efektif. Demikian pula bila kekurangan. Suatu kebijakan akan dapat berjalan efektif bila jumlah aparatur mencukupi untuk pelaksanaan.

Meskipun jumlah aparatur sudah mencukupi, apabila tidak ditunjang dengan kualitas yang memadai akan menyebabkan kebijakan menjadi kurang efektif. Sumber daya aparatur merupakan sumber daya birokrasi yang sangat penting. Kelembagaan birokrasi yang baik hanya bisa memiliki komitmen dan kompetisi yang memadai. Setiap aparatur dalam mengemban tugas jabatan dan pekerjaan kepemerintahan wajib memiliki perilaku dan sikap yang konsisten dengan misi keberadaannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Peningkatan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web, ditunjukan untuk memudahkan para aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga informasi pendidikan yang diberikan akan lebih *update* tetapi pada pelaksanaannya aparatur belum melaksanakan, pengupdatean data sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kendala dari proses pengumpulan hingga proses pengimputan data, aparatur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang, namun hambatan atau kendala terjadi pada prosesnya.

Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis, dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya aparatur di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan

berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan menaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumberdaya aparatur diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan Padati Web. Dalam pelaksanaannya kebijakan Padati Web sangan membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasikan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam server data *base*.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sub Bagian Program dan Pelaporan Kota Cimahi mempunyai jumlah aparatur, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sub Bagian Program dan Pelaporan Kota Cimahi

No	Nama	NIP	Gol
1	ABDUL MUIZ, S.Pd. M. T	19741102 200501 1 008	III/b
2	NURSALEH, S. Pd., M. MPd	19651105 198602 1 013	III/b
3	ATI SANTI SULASTRI, S.IP	19860626 201001 1 004	III/a
4	HERRY MULYAWAN, S. Pd	19830111 201001 1 008	III/a
5	BAMBANG ROMI SUJANA	19710813 199903 1 008	II/b
6	YADI FERDIADI H., S. IP		III/a

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (2012)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebagian besar aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sub Bagian Program dan Pelaporan Kota Cimahi mayoritas merupakan aparatur dengan pendidikan terakhir adalah Perguruan Tinggi dengan jumlah kelulusan S1 sebanyak 3 (tiga) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang dan SMA sebanyak 1(satu) orang.

Dengan demikian, mengenai sumber daya aparatur dibutuhkan beberapa pelatihan dalam menjalankan aplikasi teknologi, agar dapat menunjang dalam mengoperasikan, aparatur teknisi ataupun, aparatur pengelolaan data, kebijakan sistem aplikasi dinilai cukup baik karena aparatur dinilai mampu menjalankannya namun sedikit dibutuhkan pelatihan untuk pemahaman yang lebih lagi mengenai Sistem Aplikasi Padati Web, sehingga pada pelaporan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tentunya dipertanggungjawabkan.

4.2.2 Sumber Daya Informasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Peningkatan pelayanan Sumber daya informasi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah suatu sistem yang memfasillitasi pengelolaan data dan informasi pendidikan dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan sumber daya informasi difokuskan pada upaya penyelenggaraan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan *good governance* khususnya dengan penyelenggaraan pengembangan system pengolahan data berbasis teknologi infomasi (*information technology*).

Pengembangan sistem teknologi informasi dilakukan atas suatu kebijakan atas dasar sebagai kebijakan pemanfaatan teknologi informasi (*IT policy*). Selanjutnya *IT policy* dijabarkan dalam rencana pengembangan sistem dan teknologi informasi (*IT plan*). Untuk menjamin konsistensi dan integritas disusun suatu IT standard sebagai pedoman dalam menyusun strategi data dan teknologi.

Sumber daya informasi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah suatu sarana untuk memfasilitasi pelayanan informasi di bidang pendidikan. Sumber daya informasi pendidikan di Kota Cimahi disampaikan kepada masyarakat secara akurat, bahwa aparatur Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam menyampaikan informasi pendidikan yang ada di Kota Cimahi.

Informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam implementasinya memberikan informasi yaitu *data base* di dalam sistem itu adanya keterangan mengenai informasi profil sekolah dan profil wilayah yang ada di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil wawancara, bahwa Sistem Aplikasi Padati Web Informasi memberikan penjelasan mengenai semua profil sekolah dari mulai TK sampai dengan SMK yang berada di Kota Cimahi.

Informasi pendidikan yang diberikan oleh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi harus akurat, relevan, lengkap, dan jelas. Tujuannya agar memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan namun hasil akhir yang terlihat saat ini bahwa Sistem Aplikasi Padati Web hanya menampilkan mengenai angka-angka yang diambil dari data sekolah yang sebenarnya data ini hanya dibutuhkan oleh PSP Balitbang (Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan). Sehingga perlu adanya pembaharuan informasi mengenai data sekolah yang ditampilkan melalui *website*, sehingga akan lebih bermanfaat lagi untuk kepentingan masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai pendidikan yang ada di Kota Cimahi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi menyediakan sumber daya informasi melalui Sistem Aplikasi Padati Web yang dapat diakses oleh Masyarakat, dimana Sistem Aplikasi Padati Web tersebut mencakup seluruh profil sekolah yang ada di Kota Cimahi. Tujuan dibuatnya Sistem Aplikasi Padati

Web tersebut untuk memberikan kemudahan aparatur dalam memberikan data dan informasi mengenai pendidikan yang ada di Kota Cimahi melalui http://www.padatiweb.kemdiknas.go.id.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi menyediakan sumber daya informasi melalui program internet. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pengimputan data pendidikan sehingga dapat menginfomasikan pendidikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Namun apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi mengenai pendidikan secara spesifik harus datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Sistem Aplikasi Padati Web tersebut menjelaskan mengenai gambaran umum keadaan profil sekolah sekolah, jumlah siswa-siswi, jumlah kepala sekolah dan guru di Kota Cimahi.

Mengenai sumber daya informasi dalam memberikan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web sudah cukup lengkap dan kondisinya memang cukup baik, yaitu dengan adanya komputer, printer, scanner, telepon, faximili dan jaringan LAN, serta telah mengembangkan beberapa pengembangan data *base*. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam memberikan informasi pendidikan telah menyediakan sarana yang cukup baik. Ini merupakan upaya peningkatan pemberian informasi, meningkatkan koordinasi antar bagian dan mengintegrasikan informasi ditunjang dengan sarana yang lengkap.

Dengan demikian, mengenai sumber daya informasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik karena informasi yang diberikan sudah cukup lengkap, walaupun masih ada beberapa kendala yang terjadi dalam informasi, misalnya masih kurangnya informasi yang lebih spesifik yang ditampilkan dalam *website*.

4.2.3 Kewenangan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan, wewenang yang diberikan oleh Pimpinan Sub Bagian Program dan Pelaporan kepada staf Sub Bagian Program dan Pelaporan itu sendiri masih mengalami kendala. Diantaranya adalah pembagian tugas yang belum merata, hal ini terjadi karena tidak semua aparatur memahami Sistem Aplikasi Padati Web. Sebagai akibatnya, data-data mereka yang belum menyerahkan arsip menjadi menumpuk sehingga proses pengimputan data jadi terhambat.

Dengan demikian, mengenai kewenangan dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik, namun masih adanya kendala yang terjadi seperti pembagian tugas yang belum merata, hal ini terjadi karena tidak semua aparatur memahami Sistem Aplikasi Padati Web. Sebagai akibatnya, data-data mereka yang belum menyerahkan arsip menjadi menumpuk sehingga proses pengimputan data jadi terhambat. Pada pelaksanaan kewenangan, aparatur masih menjalankan tugasnya sesuai namun ada beberapa hal yang terjadi di lapangan bahwa terkadang aparatur yang kurang begitu paham mengenai hal tersebut ikut menjalankannya hal ini terjadi karena kendala kewenangan ganda yang dimiliki aparatur yang mampu dibidangnya, sehingga hal-hal tersebut yang menjadi kendala pada proses pengumpulan maupun pengimputan.

4.2.4 Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Selain jumlah dan kualitas aparatur/pegawai, sumber lain yang patut diperhatikan adalah fasilitas meskipun staf tersebut sudah memadai apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik akan menghambat pelaksanaan kerja, karena tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka sumber daya manusia yang ada tidak dapat menyelesaikan tugas secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh keterangan bahwa dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berdasarkan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengolahan data pendidikan dilaksanakan dengan baik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung pelaksanaan pengolahan data cukup baik, dari data yang diperoleh fasilitas penunjang yang ada dan dapat dilihat sebagai berikut:

1. 4 unit computer (1 server)
2. 1 printer, scanner

Sumber daya dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Padatiweb di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam pengimplementasiannya membutuhkan spesifikasi khusus dalam 1 server sehingga dalam menginformasikan kepada masyarakat mengenai pendidikan yang ada dikota Cimahi dapat sesuai sasaran.

Sumber daya dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Patiweb di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mempunyai spesifikasi minimum perangkat keras dan lunak, yaitu:

1. Server / *Standalone*
    a. Prosesor Pentium 4 atau yang setara
    b. RAM 256 MB
    c. Harddisk 40 MB
    d. Resolusi Layar (1024 x 768)
    e. Sistem Operasi : Windows XP/2000
    f. Internet Explorer versi 7
2. Klien
    a. Prosesor 600 MHz
    b. RAM 128 MB
    c. Harddisk 10 MB
    d. Resolusi Layar (1024 x 768)
    e. Sistem Operasi: Windows XP/2000
    f. Internet Explorer versi 7

Bila terjadi masalah yang berkaitan dengan aplikasi Padati Web, dapat menghubungi:

	Nama	**Telepon**	**e-Mail**
1.	Adil Abdat	0811 2200202	adil@psp.depdiknas.go.id
2.	Fuad Kleb	0813 20045222	fuad@psp.depdiknas.go.id
3.	Abdul Hakim	0816 1472784	bento_jkr@yahoo.com

Sumber: panduan penggunaan Padati Web.

3. Jardiknas

Masalah yang berkaitan dengan jaringan komunikasi data ke kantor pusat harap menghubungi

Call Center: 08001835566 (Bebas Pulsa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya *help desk* diatas maka aparatur dalam memberikan informasi mengenai pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi akan dimudahkan dalam pengerjaannya sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi pendidikan dapat dengan mudah mengetahuinya.

Dengan demikian, mengenai sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik karena komputer yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan sudah termasuk spesifikasi minimal seperti spesifikasi komputer untuk Server/*Standalone* yaitu Prosesor Pentium 4 atau yang setara, RAM 256 MB, Harddisk 40 MB, Resolusi Layar (1024 x 768), Sistem Operasi : Windows XP/2000, Internet Explorer versi 7. Untuk komputer klien yaitu Prosesor 600 MHz, RAM 128 MB, Harddisk 10 MB, Resolusi Layar (1024 x 768), Sistem Operasi: Windows XP/2000, Internet Explorer versi 7.

Hal ini jelas dapat menunjang kelancaran implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan. Seperti dalam proses pengimputan data jarang terjadinya *error* komputer, karena spesifikasi komputer

yang berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi sudah mencukupi.

4.3 Sikap Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Sikap/perilaku aparatur/pegawai adalah dimensi ketiga dalam pendekatan Edward III dalam mempelajari implementasi kebijakan. Sikap/perilaku pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan mental kerja serta kemampuan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para perumus dan pembuat kebijakan tersebut. Namun ketika sikap dari implementor tersebut berbeda dengan para perumus dan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan kemungkinan akan menjadi rumit. Karena para implementor secara independen melaksanakan kebijakan sesui dengan sikap yang mungkin berbeda dan bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya implementasi kebijakan yang efektif.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya aparatur yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga aparatur yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan,

tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras atau motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan dari pelaksananya tidak memiliki motivasi yang tinggi atau tidak memiliki kemauan yang timbul dari dalam diri para aparatur untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang ada hanya suatu keharusan untuk melaksanakannya tanpa adanya penjiwaan dalam melaksanakannya. Maka yang terjadi adalah hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sikap aparatur terhadap pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web tidak berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan sikap aparatur dapa berubah-ubah karena beberapa hal yang menjadikan hal itu terjadi, misalnya kurang termotivasi ataupun tidak memiliki kemampuan yang timbul dari dalam diri aparaturnya itu sendiri kurang penjiwaan dalam melaksanakannya, hal itu mempengaruhi pada hasil akhir kerja, kedisiplinan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk proses pengelolaan data yang perlu dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, mengenai sikap aparatur dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik karena aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya Sub Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab, seperti pelaksanaan proses penginputan data pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web secara tepat waktu. Untuk lebih jelasnya, mengenai sikap aparatur dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Sikap Aparatur Terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Sikap para aparatur sebagai pelaksana merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif diperlukan pelaksana-pelaksana yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang Sistem Aplikasi Padati Web dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap aparatur ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para aparatur untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan sangat penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di antara mereka yang bertanggung

jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Pemahaman para aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi cukup baik, hal ini pemahaman dan pendalaman terhadap pelaksanaan informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web cukup baik. Sehingga implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web dapat berjalan dengan baik. Adanya pemahaman yang tinggi dari aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dapat melayani masyarakat dengan baik. Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengadakan kegiatan seperti diklat untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing aparaturnya. Pengetahuan yang tinggi dari aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi akan menunjang terlaksananya informasi pendidikan dengan tujuan mempermudah memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap aparaturnya, dengan tujuan agar setiap aparatur yang mengikutinya dapat menambah pemahaman dan pendalaman yang tinggi tentang informasi pendidikan melalui Sistem Aplikasi Padati Web. Dan dapat dilakukannya kegiatannya sebagai berikut: *pertama*, memberikan pengertian tentang pentingnya memberikan informasi pendidikan melalui Padati Web, memberikan pengetahuan tentang profil sekolah, memberikan informasi jumlah sekolah dari TK sampai dengan SMK yang berada di Kota Cimahi. *Kedua*, memudahkan pengimputan data pendidikan seperti jumlah siswa yang masuk sekolah, jumlah guru dan kepala sekolah yang ada di Kota Cimahi.

Kegiatan yang telah dilakukan di atas bertujuan untuk meningkatkan kemudahan memberikan informasi pendidikan oleh aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi kepada Kemendiknas dan Masyarakat. Hasil kegiatan tersebut dituntut kepada setiap aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi untuk melaksanakannya. Hasil dari kegiatan tersebut walaupun belum maksimal, tetapi hasilnya sudah dirasakan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu: *pertama,* aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam pengimputan data pendidikan akan lebih cepat. *Kedua,* data yang diberikan akan selalu *update* setiap tahunnya. *Ketiga,* keterlambatan yang biasa ditemukan oleh masyarakat dapat dihindarkan, jadi dapat menumbuhkan percepatan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. *Kelima,* adanya kelancaran dalam memberikan informasi pendidikan di Kota Cimahi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemahaman dan pendalaman aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web yang tinggi akan menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi meskipun belum semaksimal mungkin. Pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberian informasi kepada Kemendiknas dan masyarakat, khususnya yang dibidang pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur, diketahui bahwa kemauan para aparatur/pelaksana untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan sudah besar atau sudah ada kemauan untuk melaksanakan, hanya tinggal didukung oleh kemampuan mereka untuk dapat melaksanakan dengan baik. Selain kemauan, aparatur/pelaksana harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, oleh karena itu penting bagi setiap pelaksana memahami dan berkomitmen dengan tanggung jawabnya sehingga dapat terwujud implementasi kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara, implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web tidak akan efektif bila tidak ditunjang oleh sikap dari para pelaksana itu sendiri. Karena sikap dari para pelaksana ini merupakan hal yang sangat penting bagi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif diperlukan pelaksana yang tidak hanya mengandalkan kemampuan saja, tetapi juga kemauan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tersebut, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebaliknya jika sikap pelaksana yang tidak baik, maka proses pelaksanaan kebiajakan akan menjadi sulit.

Dengan demikian, mengenai sikap aparatur terhadap implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik karena dilihat dari kedisiplinan para aparatur di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya di Sub Bagian

Program dan Pelaporan dalam mengimplementasikan kebijakan aplikasi Padati Web seperti pengimputan data yang dilakukan dengan tepat waktu.

4.3.2 Insentif Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Insentif merupakan imbalan yang diberikan dari pimpinan kepada bawahannya diluar gaji pokok. Hal ini sangat penting karena dapat mendorong aparatur dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Berdasarkan wawancara, dengan aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya Sub Bagian Program dan Pelaporan, aparatur mendapatkan insentif ketika adanya tugas tambahan di luar jam kerja seperti rapat koordinasi, dan sosialisasi Sistem Aplikasi Padati Web oleh Kemendiknas.

Dengan demikian, mengenai insentif aparatur dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dapat dinilai dengan baik karena dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya di Sub Bagian Program dan Pelaporan memberikan uang tambahan kepada aparatur yang mendapatkan tugas tambahan seperti rapat koordinasi, dan sosialisasi Sistem Aplikasi Padati Web oleh Kemendiknas.

4.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, namun mereka masih dirintangi oleh struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi sering merintangi berbagai perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, memunculkan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki, merintangi koordinasi dan sebagainya. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipernuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang.

Pengembangan ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan akan keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Yang menjadi fokus perhatian dari dimensi ini yaitu pembagian kerja. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa pembagian tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang tidak dilakukan dengan instansi pelaksana kebijakan, hal ini dilakukan oleh instansi lain sesuai dengan bidang yang sedang atau akan dilaksanakan dalam suatu kebijakan.

Struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, disini terlihat bahwa betapa pentingnya struktur birokrasi karena dalam rangkaian birokrasi implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Standard Operating Prosedures (SOP) menunjukan adanya pengaturan jabatan dan wewenang (*hierarki authority*) bagi setiap aparatur sumber daya demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang diatur berdasarkan garis koordinasi dan alur instruksi organisasi sebagai landasan formal maupun landasan operasional. Pemabtasan kewenangan ini dimaksudkan untuk mendorong munculnya tanggung jawab personil dan kolektif secara organisasi, dan sebagai upaya antisipasi terjadinya penumpukan wewenang dan tanggung jawab pada suatu posisi atau bidang tertentu. Hal ini memungkinkan terciptanya iklim kerja yang kondusif, kerjasama yang sehat dan pelayanan public yang optimal sesui dengan tujuan implementasi kebijakan sistem aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.

Beberapa hal di atas menunjukan bahwa pola hubungan organisasi atau suasana kerja yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, khususnya dalam pelaksanaan mengolah data pendidikan di Kota Cimahi telah menciptakan suasana kerja yang cukup kondusif dan harmonis. Yaitu dengan tetap berpedoman dan menjaga komitmen yang telah dibentuk seperti SOP dalam melaksanakan mengolah data pendidikan yaitu tetap berusaha dalam menyelesaikan tugas sesui dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari SOP yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berjalan cukup baik yang berdampak positif terhadap proses pengolahan data pendidikan. Kemudian adanya tanggung jawab dari aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik dalam melaksanakan mengolah data dan infomasi pendidikan melalui Padati Web.

Dengan demikian, mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Kota Cimahi dapat dinilai dengan baik karena aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khususnya Sub bagian Program dan Pelaporan sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seperti menyebarkan kuesioner kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi dan pengimputan data-data pendidikan Kota Cimahi.

Untuk lebih jelasnya, mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

4.4.1 *Standard operating procedures* (SOP) dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Prosedures* (SOP).

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup banyak keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Standar pengoperasian berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana kebijakan serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasarnya SOP (*Standard Operating Procedures*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum yang digunakan dalam sebuah organisasi. Dengan ini maka SOP dari Sistem Aplikasi Padati Web adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4">DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI</td><td>No. Dokumen : SOP.PRO.04</td></tr>
<tr><td>Tgl Pembuatan : 01 Agustus 2011</td></tr>
<tr><td>Tgl Revisi : -</td></tr>
<tr><td>Tgl Efektif : -</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN</td><td>Edisi/Revisi : 1/10</td></tr>
<tr><td>Halaman : 1/5</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="2">Prosedur ini bertujuan mengendalikan penyusunan Profil Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi secara baik dan benar, sehingga Profil Pendidikan dapat memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan.</td></tr>
<tr><td>Ruang Lingkup</td><td colspan="2">Prosedur ini mencakup penyusunan Profile Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Tanggung Jawab</td><td colspan="2">1. Kepala Dinas DISDIKPORA Kota Cimahi bertanggung jawab untuk mengesahkan Profil Pendidikan
2. Ka. Sub Bag Program dan Pelaporan bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyusun Profil Pendidikan</td></tr>
<tr><td>Unit/Instansi yang terkait (distribusi)</td><td colspan="2">Kepala Dinas DISDIKPORA, Wakil Manajemen Mutu, Ka. Sub Bag Program dan Pelaporan, Ka. Sub Bag Keuangan, Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Ka. Bid Pendidikan Dasar, Ka. Bid Pendidikan menengah, Ka. Bid Pendidikan Non Formal dan In Formal, Ka. Bid Pemuda dan Olahraga, Koordinator Kelompok Jafung</td></tr>
<tr><td>Landasan Hukum & Referensi</td><td colspan="2">QMS ISO 9001:2008 Klausul 7.3
Pedoman Mutu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi bagian 7.3</td></tr>
</table>

Sumber: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi (2011)

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Setiap struktur birokrasi tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

Cimahi yaitu, *pertama*, menyebarkan kuesioner yang dibuat oleh Kemendiknas ke sekolah-sekolahdi Kota Cimahi. *Kedua*, mengumpulkan kuesioner dari sekolah-sekolah di Kota Cimahi. *Ketiga*, melalakukan validasi data-data dari sekolah. *Keempat*, melaporkan data-data pendidikan ke Kemendiknas.

Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam mengelola data pendidikan menciptakan kultur organisasi yang kondusif melalui Sistem Aplikasi Padati Web. Dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi, yaitu tetap menjaga kerjasama antara aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian membangun sistem kebersamaan serta hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan dan merupakan mitra kerja, bawahan dapat mengemukakan gagasan-gagasan baru, serta untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparatur. Maka diberikan uang insentif yang sifatnya resmi diluar gaji. Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pelaksanaan mengolah data pendidikan melalui Padati Web serta mengacu kepada tujuan organisasi seperti SOP yang telah dibentuk dengan adanya visi dan misi.

Dengan demikian, bahwa SOP dalam melaksanakan kebijakan Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang tersedia dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web sudah cukup membantu. Oleh karena itu, SOP sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kinerja aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi untuk membantu dalam menginformasikan data pendidikan di Kota Cimahi.

Dengan demikian, mengenai SOP dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi di nilai cukup baik karena aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi khusunya Sub Bagian Program dan Pelaporan sudah melaksanakan prosedur yang ada seperti *pertama*, aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi menyebarkan kuesioner yang dibuat oleh Kemendiknas ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. *Kedua*, mengumpulkan kuesioner dari sekolah-sekolah di Kota Cimahi. *Ketiga*, melalakukan validasi data-data pendidikan dari sekolah. *Keempat*, melaporkan data-data pendidikan ke Kemendiknas melalui Sistem Aplikasi Padati Web.

4.4.2 Pembagian Tanggung Jawab Aparatur dalam Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan suatu

gambaran yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang aparatur, bidang dan hubungan perkerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi didalam tugasnya sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi melaksanakan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation)*.

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web. Hubungan yang terjadi diantara para aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengolahan data pendidikan, apabila pola hubungan yang terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan Sistem Aplikasi Padati Web.

Pola hubungan pelaksanaan Padati Web yang terjadi didalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi berlangsung dengan baik, hal terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan pengolahan data pendidikan tersebut. Pembagian tanggung jawab para aparatur dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan

bekerja sama, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi. Para aparatur kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerja sama.

Pembagian tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian lain, antara bagian tersebut saling bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, misalnya aparatur berkewajiban menyebarkan kuesioner ke sekolah-sekolah. Pembagian tanggung jawab para aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar proses pengolahan data pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, mengenai pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Padati Web di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dinilai cukup baik karena tanggung jawab yang diberikan kepada aparatur khususnya aparatur yang ada di Sub bagian Program dan Pelaporan seperti *pertama*, menyebarkan kuesioner yang dibuat oleh Kemendiknas ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi. *Kedua*, mengumpulkan kuesioner dari sekolah-sekolah di Kota Cimahi. *Ketiga*, melalakukan validasi data-data pendidikan dari sekolah. *Keempat*, melaporkan data-data pendidikan ke Kemendiknas melalui sistem aplikasi Padati Web, namun masih adanya kendala yang terjadi seperti pembagian tanggung yang belum merata, hal ini terjadi karena tidak semua aparatur memahami aplikasi Padati

Web. Sebagai akibatnya, data-data mereka yang belum menyerahkan arsip menjadi menumpuk sehingga proses pengimputan data jadi terhambat .